

Pengaruh Kemandirian, Efisiensi, Ketergantungan Keuangan Daerah dan Utang pada Pendapatan Terhadap Keberlanjutan Keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Tiara Meilinda¹, Sukmini Hartati², Siska Aprianti³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, tiarameilinda203@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, sukmini_hartati@polsri.ac.id

³Politeknik Negeri Sriwijaya, siskaaprianti@polsri.ac.id

ABSTRACT

Understanding the impact of regional finance, regional financial efficiency, regional financial dependency, and debt on income in the direction of financial sustainability in the province of South Sumatra is the goal of this quantitative study. The Regional Government Financial Reports (LKPD) for 2019–2023 provided the secondary data used in this investigation. According to the study's findings, financial sustainability is somewhat positively impacted by both the regional financial independence and dependency variables. Financial sustainability is somewhat negatively impacted by the debt-to-income ratio. In the meantime, financial sustainability is not entirely impacted by the regional financial efficiency variable. Financial sustainability in South Sumatra Province's regencies and cities is significantly impacted simultaneously by all of the following factors: independence, efficiency, regional financial dependency, and debt to income.

Keywords: *Influence, Financial Independence, Efficiency, Regional Financial Dependency, Debt-To-Revenue Ratio, Financial Sustainability.*

ABSTRAK

Memahami dampak keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah, dan utang terhadap pendapatan dalam arah keberlanjutan keuangan di provinsi Sumatera Selatan adalah tujuan dari studi kuantitatif ini. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun 2019–2023 menyediakan data sekunder yang digunakan dalam penyelidikan ini. Menurut temuan studi, keberlanjutan keuangan sedikit dipengaruhi positif oleh variabel independensi dan ketergantungan keuangan daerah. Keberlanjutan keuangan sedikit dipengaruhi negatif oleh rasio utang terhadap pendapatan. Sementara itu, keberlanjutan keuangan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel efisiensi keuangan daerah. Keberlanjutan keuangan di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi secara signifikan secara bersamaan oleh semua faktor berikut: kemandirian, efisiensi, ketergantungan keuangan daerah, dan utang terhadap pendapatan.

Kata kunci: Kemandirian, Efisiensi, Ketergantungan Keuangan Daerah, Utang pada Pendapatan, Keberlanjutan Keuangan.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah yang lebih besar untuk pemerintah daerah dalam mengelola kegiatan pemerintah di wilayah mereka masing-masing adalah tujuan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diharapkan undang-undang ini akan mendorong pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat integrasi nasional (Maizunati et al., 2020). Pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan dengan cara yang efektif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Wiksuana & Kusumawati, 2017). Peningkatan pendapatan daerah juga diikuti dengan bertambahnya tanggungan yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah untuk memberikan bantuan sosial atau fasilitas publik untuk memenuhi kebutuhan



masyarakat. Namun, akan ada defisit operasional jika utang dan kewajiban pemerintah daerah lebih besar daripada pendapatannya (Wardhani & Payamta, 2020). Akibatnya, pemerintah daerah dapat meminjam uang dengan mempertimbangkan kapasitas daerah untuk membayarnya kembali dan tanpa membahayakan keuangan daerah.

Selain mempertimbangkan situasi keuangan mereka, melayani masyarakat adalah tugas utama pemerintah daerah. Ukuran kesehatan finansial yang membantu adalah keberlanjutan finansial, atau kemampuan pemerintah dalam menjaga atau meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat ditunjukkan melalui penyediaan layanan publik yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, saat ini maupun di masa mendatang (Bisogno et al., 2017). Pemerintah daerah berperan penting dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan melalui evaluasi kondisi wilayah, identifikasi kebutuhan serta potensi sumber daya, pembentukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, pelaksanaan kebijakan yang sesuai, serta penetapan skala prioritas bagi proyek-proyek yang relevan. Fungsi empiris pemerintah dalam mencapai tujuan komunitas yang berkelanjutan secara signifikan membantu pemahaman tentang jaringan rumit pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Supriatna, 2021).

Keberlanjutan keadaan keuangan pemerintah daerah disebut sebagai keberlanjutan keuangan. Pemerintah daerah harus menetapkan tujuan yang memperhitungkan variabel yang dapat mempengaruhi keberlanjutan keuangan suatu wilayah. Menilai Keberlanjutan Keuangan penting untuk mempertahankan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan dan memperoleh biaya di masa depan (Gleißner et al., 2022). Faktor-faktor terkait kebijakan pengeluaran dan pendapatan, pembayaran utang, and faktor-faktor sosial-ekonomi dan lingkungan di masa depan menjadi faktor yang menentukan Keberlanjutan Keuangan suatu daerah (Dorasamy & Kapesa, 2024). Berikut grafik mengenai rasio surplus/ defisit laporan operasional antara tahun 2019 dan 2023 di pemerintah daerah/kota provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1 Rasio Surplus/Defisit Laporan Operasional Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam %)

Nama Kab/Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banyuasin	-6,19	-82,35	434,28	18,09	55,80
Empat Lawang	-76,22	-55,81	13,57	178,02	-31,09
Lahat	46,44	-140,31	-181,11	404,14	19,66
Muara Enim	186,07	-112,36	-58,68	-2.167,11	-17,77
Musi Banyuasin	-188,71	-222,38	-169,24	-8,18	-24,50
Musi Rawas	-64,57	-133,17	-434,96	20,83	-52,48
Musi Rawas Utara	-35,58	-114,78	-705,82	91,67	18,19
Ogan ilir	-7,44	-106,05	-1.869,91	22,86	15,25
OKI	51,23	-117,43	34,25	-188,74	148,90
OKU	38,67	-153,40	-73,67	-464,62	-64,26
OKUS	-24,46	-97,28	940,98	508,81	-78,27
OKUT	19,01	13,06	1,61	18,29	2,73
Pali	149,18	-130,09	-350,95	63,14	-67,92
Lubuk Linggau	82,94	15,13	-41,71	91,04	-118,46
Pagar Alam	189,35	-18,57	-49,38	223,12	-5,32
Palembang	1,99	-13,03	7,86	54,04	9,06
Prabumulih	-27,05	-138,2	-291,46	75,49	102,36

Sumber: BPK RI (Data diolah, 2025)

Menurut data, sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Selatan mengalami defisit yang parah, seperti kabupaten Muara Enim (-2.167,11% pada tahun 2022) dan kabupaten Ogan Ilir (-1.869,91% pada tahun 2021). Fenomena ini mencerminkan pengeluaran daerah jauh melebihi pendapatan daerah, menandakan keberlanjutan keuangan daerah sedang mengalami tekanan yang serius. Kondisi ini merupakan salah satu pengaruh dari wabah COVID-19 yang terjadi di akhir tahun 2019, dimana terjadi peningkatan belanja pasca-Covid untuk mendorong pemulihan ekonomi. Sedangkan peningkatan belanja tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Sehingga terjadi penurunan nilai keuangan laporan operasional pemerintah daerah yang mencakup berbagai faktor yang secara signifikan memengaruhi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Defisit anggaran disebabkan dari meningkatnya pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam upaya mendorong aktivitas ekonomi. Setiap tahun fiskal, saldo keseluruhan adalah negatif atau defisit karena pengeluaran melebihi penerimaan (Widiaty & Nugroho, 2020). Jika suatu daerah mengalami defisit anggaran secara terus-menerus selama bertahun-tahun, maka banyak dampak yang mungkin akan terjadi meliputi meningkatnya utang pemerintah, ketidakstabilan ekonomi, inflasi, serta mengurangnya pelayanan publik.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain faktor ekonomi maupun non ekonomi, faktor internal, eksternal, atau bahkan politik (Yudha et al., 2023). Faktor ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, sedangkan faktor non ekonomi misalnya tingkat pertumbuhan populasi (Al-Obaidi & Almashhadani, 2023). Dengan demikian, pemahaman terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap situasi keuangan sangat penting bagi pemerintah suatu daerah untuk membuat pilihan yang bijak dan masuk akal guna meningkatkan layanan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan terus bergantung pada transfer dari pemerintah nasional. Tingkat pendapatan di daerah tersebut rendah menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dan ketergantungan daerah yang tinggi (Syam & Zulfikar, 2022). Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diterima oleh suatu daerah dari pemerintah pusat atau instansi lainnya (Dinah & Darsono, 2023). Besarnya pendapatan transfer tersebut dapat berdampak langsung terhadap pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan transfer yang diterima daerah tersebut cukup besar, maka pendapatan asli daerah dapat menurun karena kurangnya motivasi daerah untuk meningkatkannya secara mandiri (Surgawati, 2022).

Kemandirian finansial kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Selatan bervariasi antara 50% dan 75%, menurut penelitian oleh Kusumadewi (2021). Penelitian Kusumadewi juga menjelaskan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah maupun pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan negatif dalam kurun waktu 2015-2019. Hal lain seperti covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan kestabilan keuangan dunia terganggu. Pada tahun 2019-2021, perkembangan realisasi pendapatan dan belanja pada kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan mengalami defisit (Olandari et al., 2023).

Penelitian terkait keberlanjutan keuangan telah dilakukan oleh Muhammad Rifat Sebastian pada tahun 2023. Dalam penelitiannya, Sebastian (2023) melakukan studi tentang variabel-variabel yang mempengaruhi keberlanjutan finansial di pemerintah



daerah, khususnya di kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, antara tahun 2017 dan 2021. Variabel dependen dalam studi ini meliputi ukuran daerah, rasio utang terhadap pendapatan, dan kemandirian serta ketergantungan keuangan lokal. Temuan menunjukkan bahwa sementara utang terhadap pendapatan memiliki dampak negatif dan signifikan pada keberlanjutan finansial, ukuran daerah memiliki dampak positif dan signifikan pada keberlanjutan finansial, dan kemandirian serta ketergantungan lokal tidak memiliki pengaruh yang dapat dibedakan. Secara keseluruhan, keberlanjutan finansial sangat dipengaruhi secara bersamaan oleh kemandirian lokal, ketergantungan lokal, utang terhadap pendapatan, dan ukuran daerah.

Adanya penelitian mengenai keberlanjutan keuangan pada sektor publik yang dilakukan Sebastian et al., (2023), membuat penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian tambahan tentang keberlanjutan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan tahun anggaran 2019–2023. Kemandirian keuangan regional, efisiensi keuangan regional, ketergantungan keuangan regional, dan utang terhadap pendapatan adalah variabel dependen yang digunakan dalam studi ini. Selain itu, investigasi menyeluruh yang melihat dampak dari empat faktor krusial kemandirian keuangan, efisiensi keuangan, ketergantungan keuangan regional, dan pendapatan terhadap utang di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Selatan antara 2019 dan 2023 belum pernah dilakukan.

Tujuan dari dilakukan studi ini untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah dan Utang pada Pendapatan terhadap keberlanjutan keuangan di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan pada tahu 2019 sampai dengan tahun 2023.

B. KAJIAN TEORI

Teori Neo-Institusionalisme

Rodríguez Bolívar et al., (2021) mengklaim bahwa kebijakan yang sah dan dapat diterima secara sosial, seperti yang terdapat dalam program pendanaan pemerintah daerah, juga terkait dengan teori neo-institusional. Kekuatan untuk secara independen menghasilkan pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi, keuntungan dari perusahaan negara, dan pendapatan legal lainnya, tergantung pada masing-masing daerah. Masyarakat mendukung strategi ini, dan daerah dengan tingkat otonomi yang tinggi mampu membiayai operasi pemerintahan mereka sendiri tanpa bergantung pada uang dari pemerintah federal. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat ketergantungan yang rendah dan tingkat kemandirian yang tinggi mungkin dapat mencapai keberlanjutan finansial. Daerah lebih mandiri dinilai lebih mampu menjalankan fungsi pemerintah secara berkelanjutan karena tidak terlalu bergantung pada sumber eksternal, hal ini sesuai dengan nilai-nilai institusional berupa otonomi dan akuntabilitas lokal.

Keberlanjutan Keuangan

Menurut Al-Obaidi & Almashhadani (2023), Keberlanjutan Keuangan adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa anggaran nasional secara keseluruhan tidak mengalami defisit fiskal, yang memerlukan reorganisasi sumber pembiayaan dan prioritas belanja untuk mengatasi kekurangan di masa depan. Artinya pemerintah harus mampu memaksimalkan kebijakan pengeluarannya dengan pendapatan saat ini. Keuangan keberlanjutan sangat bergantung pada biaya saat ini dan potensi pendapatan dengan kebijakan baik dengan meningkatkan pendapatan

atau mengurangi pengeluaran tanpa terkena kebangkrutan keuangan. Dengan demikian, keuangan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai kondisi keuangan dimana pemerintah mampu memberikan kualitas layanan publik yang baik saat ini tanpa mengurangi kualitas layanan publik di masa depan.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Nalle et al., (2021) Kemandirian keuangan daerah dapat ditentukan dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer Asli terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini, yang dikenal sebagai indikator otonomi fiskal, digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pelayanan publik secara mandiri. Kemampuan ini bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah, tanpa ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan eksternal seperti bantuan atau pinjaman dari pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk melaksanakan hak finansial secara efektif dan efisien dengan membuktikan peningkatan pendapatan asli daerah disebut sebagai kemandirian finansial (Ritonga et al., 2019).

Efisiensi Keuangan Daerah

Dengan membandingkan total pengeluaran dan total penerimaan, seseorang dapat menentukan seberapa efisien keuangan daerah sesuai dengan realisasi pendapatan yang diterima (Panawan et al., 2021). Sebuah wilayah dianggap efisien secara finansial jika pengeluaran lokalnya kurang dari pendapatan lokalnya. Efisiensi dapat dicapai jika jumlah keluaran memenuhi tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan (Muflihani, 2018).

Ketergantungan Keuangan Daerah

Dengan membagi seluruh pendapatan daerah dengan total jumlah penerimaan transfer, rasio ketergantungan keuangan ditentukan. Ketika pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah daerah atau provinsi, rasio ini meningkat. Konsep ketergantungan lokal digunakan untuk menilai seberapa tergantung pemerintah daerah terhadap pemerintah federal (Susanto, 2019).

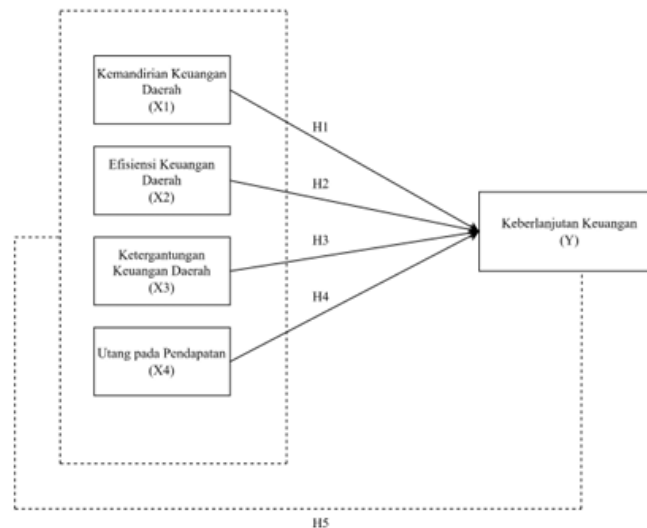
Utang pada Pendapatan

Menurut (Wardhani dan Payamta, 2020), rasio utang terhadap pendapatan menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk pembayaran utang. Pendapatan regional secara keseluruhan dibagi dengan total utang pemerintah daerah untuk mencapai rasio ini.

Kerangka Berfikir

Studi ini berfokus pada kota dan kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Analisis ini dibentuk oleh faktor-faktor independen seperti utang terhadap pendapatan, ketergantungan keuangan daerah, kemandirian finansial, dan efisiensi keuangan daerah. Sementara itu, keberlanjutan keuangan adalah variabel dependen. Kerangka teoretis berikut ini berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis dan menggambarkan dampak dari variabel independensi keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, ketergantungan keuangan daerah dan Utang pada Pendapatan.





Gambar Kerangka Berfikir

Hipotesis

- H1 : Kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.
- H2 : Efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.
- H3 : Ketergantungan daerah berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.
- H4 : Utang pada Pendapatan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.
- H5 : Kemandirian keuangan daerah, efisiensi keuangan daerah, ketergantungan daerah dan Utang pada Pendapatan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengelolaan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun 2019–2023 yang diambil dari situs web Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, studi ini bersifat kuantitatif. Jenis studi yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal.

Berdasarkan informasi yang diakses melalui portal E-PPID Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia, e-ppid.bpk.go.id, studi ini dilakukan di 17 kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.

Dalam studi ini, terdapat dua variabel: variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Keberlanjutan Finansial (Y). Variabel independen dalam studi ini adalah Utang terhadap Pendapatan (dinyatakan dengan X1, X2, X3, dan X4), Independensi Finansial Daerah, Efisiensi Finansial Daerah, dan Ketergantungan Finansial Daerah.

Seluruh administrasi kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2019–2023 merupakan populasi penelitian. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai sampel. Secara keseluruhan, 85 sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini, termasuk jumlah populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota x 5 tahun periode anggaran di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk studi ini, strategi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari Laporan Hasil Audit (LHP) yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2019 hingga 2023.

Memilih model data panel, menguji model regresi data panel, dan melakukan uji asumsi klasik adalah semua bagian dari analisis regresi linier berganda dan kemudian pengujian hipotesis, adalah metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui dampak independensi, efisiensi, ketergantungan regional, dan utang terhadap pendapatan. Koefisien Determinasi yang Disesuaikan (R^2), uji parsial (uji-t), dan uji simultan (uji-F) adalah komponen pengujian hipotesis. Program Econometric Views (EViews) 13 dipakai pada studi ini untuk melaksanakan prosedur analisis data panel.

Tabel Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Sumber Data	Skala Pengukuran
1.	Keberlanjutan Keuangan (Y)	Kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan saat ini tanpa mengurangi kemampuannya untuk melakukannya di masa depan.	Keberlanjutan Keuangan = $\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Beban Operasional} + \text{Pos Luar Biasa}}$	Laporan Operasional Tahun 2019-2023	Rasio
2.	Kemandirian Keuangan Daerah (X_1)	Perbandingan antara pendapatan transfer pusat dan provinsi dengan total pendapatan asli daerah	$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023	Rasio
3.	Efisiensi Keuangan Daerah (X_2)	Perbandingan dari total belanja terhadap total pendapatan	$\text{Efisiensi Keuangan} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023	Rasio
4.	Ketergantungan Daerah (X_3)	Perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer pusat/provinsi	$\text{Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023	Rasio
5.	Utang pada Pendapatan (X_4)	Ukuran keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga memiliki kewajiban utang yang relative terhadap pendapatan yang digunakan untuk membayar utang	$\text{Rasio Utang Terhadap Pendapatan} = \frac{\text{Total Utang Pemerintah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun 2019-2023	Rasio

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif

Tabel Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	0.101799	0.872606	0.860080	0.065920	25.74977
Median	0.080402	0.850304	0.891237	0.041446	25.73106
Maximum	0.547995	1.099421	0.954294	0.555700	27.80312
Minimum	0.024937	0.637942	0.556888	0.003591	23.19948
Std. Dev.	0.095095	0.092888	0.085210	0.079109	0.990085

Sumber: Data diolah (Excel) 2025

Berdasarkan tabel, selama tahun 2019-2023 Keberlanjutan Keuangan yang terendah yaitu Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 dengan defisit sebesar Rp.331.840.443.091, sedangkan yang tertinggi yaitu kota Palembang di tahun 2023 dengan surplus sebesar Rp. 1.187.799.238.655,14. Rasio kemandirian keuangan daerah yang terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2021 sebesar 2%, sedangkan yang tertinggi dicapai di tahun 2022 sebesar 54,7% pada Kota Palembang. Rasio efisiensi keuangan daerah yang terendah yaitu Kabupaten Pali pada tahun 2021 sebesar 63%, sedangkan yang tertinggi dicapai di tahun 2023 sebesar 109% pada Kabupaten Pali. Rasio ketergantungan keuangan daerah yang terendah yaitu Kota Palembang pada tahun 2022 sebesar 55,7%, sedangkan yang tertinggi dicapai di tahun 2022 sebesar 95% pada Kabupaten Empat Lawang. Rasio utang terhadap pendapatan yang terendah diraih oleh Kabupaten Lahat pada tahun 2021 sebesar 0,0036, sedangkan rasio tertingginya dicapai oleh Kabupaten Pali sebesar 0,556 pada tahun 2020.

Pemilihan Model

Uji Chow

Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.976488	(16,64)	0.0010
Cross-section Chi-square	47.281363	16	0.0001

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2025

Dengan probabilitas 0.0010, nilai statistik *Fixed cross-section* yang diperoleh dari Tabel adalah 2.976488. Model efek tetap lebih disukai dibandingkan model efek bersama karena nilai probabilitas < 0.05.

Uji Hausman

Tabel Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.386194	4	0.2499

Sumber: Output data diolah (2025)

Menurut Tabel, *Cross-section random* memiliki probabilitas 0.2499 dan nilai statistik *chi square* sebesar 5.386194. Karena nilai probabilitas > 0.05, model efek acak direkomendasikan dibandingkan *fixed effect model*.

Uji Lagrange-Multiplier

Tabel Hasil Uji Lagrange-Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	9.512503 (0.0020)	7.527890 (0.0061)	17.04039 (0.0000)
Honda	3.084235 (0.0010)	2.743700 (0.0030)	4.120972 (0.0000)
King-Wu	3.084235 (0.0010)	2.743700 (0.0030)	3.833352 (0.0001)
Standardized Honda	3.678195 (0.0001)	3.707143 (0.0001)	1.420995 (0.0777)
Standardized King-Wu	3.678195 (0.0001)	3.707143 (0.0001)	1.732526 (0.0416)
Gourieroux, et al.	--	--	17.04039 (0.0001)

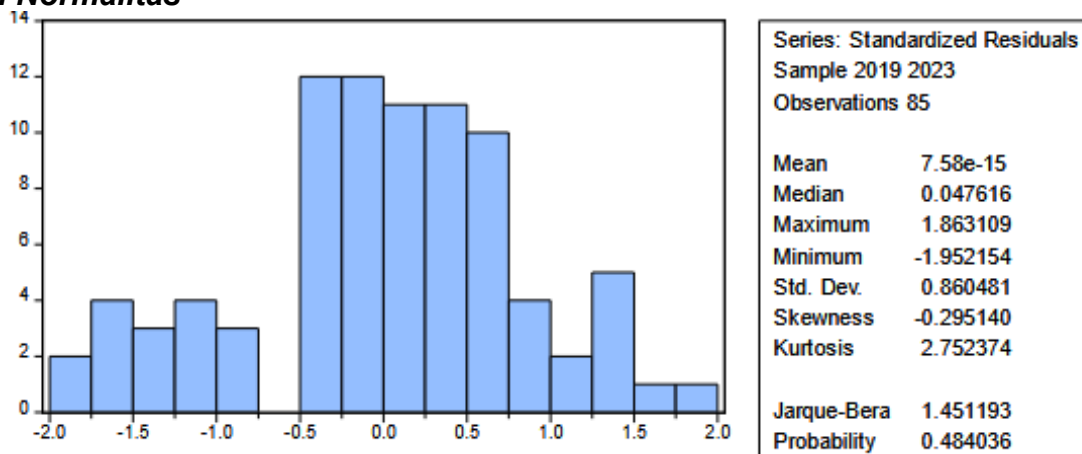
Sumber: Output data diolah (2025)

Tabel menunjukkan bahwa nilai *Breusch-Pagan Both* adalah 0.0000. Mengingat bahwa kedua nilai signifikansi *Breusch-Pagan* < tingkat signifikansi 0.05, H0 ditolak, menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) adalah model terbaik yang digunakan.

Mengacu pada hasil pengujian model, *random effect model* ialah metode perkiraan untuk persamaan regresi data panel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar Diagram Pengujian Normalitas (Sumber: Output data diolah, 2025)



Uji normalitas menghasilkan nilai statistik Jarque-Bera senilai 1,451193 dengan probabilitas sebesar 0,484036. Oleh sebabnya nilai probabilitas > 0,05 maka bisa dinyatakan bahwa asumsi normalitas residual terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.356243	-0.797676	-0.033653
X2	0.356243	1.000000	-0.287129	0.077138
X3	-0.797676	-0.287129	1.000000	0.044664
X4	-0.033653	0.077138	0.044664	1.000000

Sumber: Output data diolah (Eview 12) 2025

Tampak jelas dari tabel bahwa variabel independen tidak memiliki koefisien korelasi > 0,8. Jadi, dapat dikatakan bahwa multikolinearitas tidak ada.

Analisis Regresi Linear

Tabel Hasil Analisis Regresi dengan Model Random Effect Model

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/19/25 Time: 07:31
 Sample: 2019 2023
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (balanced) observations: 85
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.28326	1.955588	11.90601	0.0000
X1	7.128548	1.892206	3.767322	0.0003
X2	-1.337091	1.101155	-1.214263	0.2282
X3	3.582436	1.744331	2.053759	0.0433
X4	-2.633423	1.140580	-2.308844	0.0235

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.465082	0.2831
Idiosyncratic random		0.740044	0.7169

Weighted Statistics			
R-squared	0.197020	Mean dependent var	14.92958
Adjusted R-squared	0.156871	S.D. dependent var	0.812908
S.E. of regression	0.746428	Sum squared resid	44.57240
F-statistic	4.907235	Durbin-Watson stat	1.827658
Prob(F-statistic)	0.001370		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.244669	Mean dependent var	25.74977
Sum squared resid	62.19587	Durbin-Watson stat	1.309783

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2025

Persamaan regresi data panel yang berikut dapat dibuat dari tabel.

$$Y = 23,283 + 7,128 X1 - 1,337 X2 + 3,582 X3 - 2,633 X4$$

Keterangan:

- Y = Keberlanjutan keuangan
- X1 = Kemandirian keuangan
- X2 = Efisiensi keuangan daerah
- X3 = Ketergantungan daerah
- X4 = Utang pada pendapatan

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R²)

Weighted Statistics			
R-squared	0.197020	Mean dependent var	14.92958
Adjusted R-squared	0.156871	S.D. dependent var	0.812908
S.E. of regression	0.746428	Sum squared resid	44.57240
F-statistic	4.907235	Durbin-Watson stat	1.827658
Prob(F-statistic)	0.001370		

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2025

Nilai koefisien determinasi adjusted (R²) sebesar 0,156871 artinya persamaan regresi yang diperoleh mampu menjelaskan 15,69% variasi nilai Y. Hal itu berarti bahwa 100% – 15,69% = 84,31% variasi nilai Y merupakan kontribusi pengaruh variabel di luar model.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1 Hasil Analisis Uji Parsial (Uji t) dengan Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/19/25 Time: 07:31
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 17
Total panel (balanced) observations: 85
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.28326	1.955588	11.90601	0.0000
X1	7.128548	1.892206	3.767322	0.0003
X2	-1.337091	1.101155	-1.214263	0.2282
X3	3.582436	1.744331	2.053759	0.0433
X4	-2.633423	1.140580	-2.308844	0.0235

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2025

Dari tabel hasil uji t, dapat dijelaskan:

1. Uji statistik terhadap koefisien regresi X1 menghasilkan nilai t-statistic sebesar 3,7673 dengan probabilitas sebesar 0,0003. Oleh karena probabilitas < 0,05 maka H1 diterima, dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh positif (koefisien bernilai positif) terhadap Y.



2. Uji statistik terhadap koefisien regresi X2 menghasilkan nilai t-statistic sebesar -1,2143 dengan probabilitas sebesar 0,2282. Oleh karena probabilitas $> 0,05$, maka H2 ditolak, dapat disimpulkan bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y.
3. Uji statistik terhadap koefisien regresi X3 menghasilkan nilai t-statistic sebesar 2,0538 dengan probabilitas sebesar 0,0433. Oleh karena probabilitas $< 0,05$ maka H3 diterima, dapat disimpulkan bahwa X3 berpengaruh positif (koefisien bernilai positif) terhadap Y.
4. Uji statistik terhadap koefisien regresi X4 menghasilkan nilai t-statistic sebesar -2,3088 dengan probabilitas sebesar 0,0235. Oleh karena probabilitas $< 0,05$ maka H4 diterima, dapat disimpulkan bahwa X4 berpengaruh negatif (koefisien bernilai negatif) terhadap Y.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel Hasil Uji Simultan (Uji F) dengan Random Effect Model

Weighted Statistics			
R-squared	0.197020	Mean dependent var	14.92958
Adjusted R-squared	0.156871	S.D. dependent var	0.812908
S.E. of regression	0.746428	Sum squared resid	44.57240
F-statistic	4.907235	Durbin-Watson stat	1.827658
Prob(F-statistic)	0.001370		

Sumber: Output data diolah (Eviews 12) 2025

Uji statistik terhadap model secara keseluruhan menghasilkan nilai *F-statistic* sejumlah 4,907235 dengan probabilitas sejumlah 0,001370. Ditentukan bahwa X1, X2, X3, dan X4 semuanya secara simultan mempengaruhi Y karena kemungkinan $< 0,05$.

Pembahasan

Jelas dari analisis yang telah dilakukan bahwa variabel kemandirian keuangan menghasilkan nilai *t-statistic* sebesar 3,7673 dengan probabilitas sebesar 0,0003. Variabel keberlanjutan finansial memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan finansial karena probabilitasnya $< 0,05$. Ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu membiayai operasi pemerintah mereka secara mandiri seringkali lebih stabil secara fiskal dan tidak bergantung penuh pada dana pusat.

Variabel efisiensi keuangan daerah menghasilkan nilai *t-statistic* -1.2143 dengan probabilitas 0.2282. Mengingat bahwa probabilitasnya > 0.05 , bisa dikatakan bahwa variabel efisiensi keuangan regional tidak mempunyai dampak parsial pada keberlanjutan keuangan. Hal ini dapat disebabkan karena efisiensi yang diterapkan masih bersifat administratif (misalnya penyerapan anggaran), bukan berbasis hasil dan dampak (output dan outcome), sehingga tidak menghasilkan efek nyata terhadap kondisi fiskal jangka panjang.

Variabel ketergantungan keuangan daerah menghasilkan nilai *t-statistic* dari 2.0538 dengan probabilitas 0.0433. Ketergantungan faktor keuangan regional memiliki pengaruh parsial positif yang substansial terhadap keberlanjutan keuangan, seperti yang ditunjukkan oleh probabilitas < 0.05 . Meskipun secara teori ketergantungan fiskal dianggap negatif, dalam konteks Indonesia, terutama di daerah dengan PAD rendah, ketergantungan pada dana transfer dari pusat (DAU, DAK,

DBH) justru menopang keberlanjutan keuangan. Transfer fiskal memberikan stabilitas pendanaan yang dibutuhkan daerah untuk menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.

Variabel utang pada pendapatan menghasilkan nilai *t-statistic* sejumlah -2,3088 dengan probabilitas 0,0235. Mengingat bahwa kemungkinan tersebut $< 0,05$, dapat dikatakan bahwa terdapat dampak parsial negatif yang cukup besar dari variabel utang terhadap pendapatan pada keberlanjutan finansial. Utang yang tinggi dapat membebani anggaran daerah karena harus dialokasikan untuk pembayaran bunga dan pokok utang, sehingga mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, utang yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko fiskal dan menurunkan kepercayaan investor serta masyarakat terhadap kemampuan keuangan daerah (Siska, 2025).

Berdasarkan tabel 4.8, uji statistik secara keseluruhan menghasilkan nilai F-hitung sebesar 4,907235 dengan probabilitas sebesar 0,001370. Oleh karena F hitung $> F$ -tabel ($4,907235 > 2,49$) dan probabilitas $< 0,05$ maka bisa disimpulkan bahwa semua variabel yaitu kemandirian daerah, efisiensi, ketergantungan dan utang pada pendapatan secara simultan berpengaruh terhadap keberlanjutan keuangan. Dengan nilai koefisien determinasi adjusted (R^2) sebesar 0,1569, artinya variabel kemandirian, efisiensi, ketergantungan dan utang pada pendapatan mampu menjelaskan 15,69% dari keberlanjutan keuangan. Selain itu, 84,31% dipengaruhi oleh faktor tambahan yang tidak dibahas pada penelitian ini. Variabel kemandirian dan efisiensi keuangan menunjukkan adaptasi positif terhadap tekanan tersebut, memperkuat legitimasi dan kapasitas fiskal daerah. Sebaliknya, ketergantungan keuangan dan rasio utang yang tinggi mencerminkan tantangan institusional yang harus diatasi agar keberlanjutan keuangan dapat terwujud secara optimal. Upaya peningkatan keberlanjutan keuangan daerah harus melibatkan reformasi kelembagaan yang memperkuat kemandirian dan efisiensi, serta mengurangi ketergantungan dan risiko utang, sesuai dengan kerangka neo institusionalisme yang mengedepankan adaptasi institusional dalam konteks sosial-politik yang dinamis.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan berikut dari temuan analisis tersebut:

1. Keberlanjutan sangat dipengaruhi secara positif oleh variabel independensi finansial regional. Semakin mandiri secara finansial suatu daerah semakin kuat pula keberlanjutan keuangan yang dimilikinya.
2. Variabel efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap keberlanjutan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi penting, namun belum secara langsung mampu mendorong keberlanjutan fiskal.
3. Variabel ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap keberlanjutan keuangan. Meskipun secara teori ketergantungan fiskal dianggap negatif, dalam konteks Indonesia, terutama di daerah dengan PAD rendah, ketergantungan pada dana transfer dari pusat (DAU, DAK, DBH) justru menopang keberlanjutan keuangan.
4. Variabel utang pada pendapatan berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap keberlanjutan keuangan. Peningkatan proporsi utang terhadap pendapatan daerah dapat menurunkan keberlanjutan fiskal karena menciptakan beban pembayaran di masa depan dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, utang berpotensi menjadi beban



struktural yang melemahkan kemampuan fiskal daerah.

5. Kemandirian, efisiensi, keberlanjutan finansial sangat dipengaruhi secara bersamaan oleh ketergantungan finansial regional dan utang yang bergantung pada pendapatan. Nilai p sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai statistika F sebesar 4,907 mendukung hal ini, yang menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi keberlanjutan keuangan. Namun demikian, nilai Adjusted R^2 yang hanya sebesar 15,69% menyarankan bahwa keberlanjutan keuangan daerah masih terpengaruh oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam model yang digunakan

Saran

Berdasarkan hasil studi dan pengalaman selama proses penelitian, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data keuangan agar penelitian serupa dapat dilakukan dengan lebih mudah hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
2. Peneliti yang akan datang diharapkan untuk memperluas periode pengamatan atau menambah variabel lain yang relevan agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, peneliti perlu memastikan ketersediaan dan keseragaman data sejak awal.
3. Bagi pengambil kebijakan diharapkan dapat memperhatikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam upaya menaikkan kemandirian dan efisiensi keuangan serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Obaidi, M. B. M., & Almashhadani, A. N. (2023). Financial Sustainability Assessment in Iraq for The Period 2015-2021. *Resmilitaris*, 13(1), 758–767.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I. (2017). Financial Sustainability in Local Governments: Definition, Measurement and Determinants. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169919368>
- Dinah, L. S., & Darsono, D. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah se-Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3).
- Dorasamy, N., & Kapesa, T. (2024). Financial Sustainability of Local Governments in Southern Africa. *Financial Sustainability of Local Governments in Southern Africa*, 14(1), 159–170. <https://doi.org/10.4324/9781003498230>
- Gleißner, W., Günther, T., & Walkshäusl, C. (2022). Financial sustainability: measurement and empirical evidence. In *Journal of Business Economics* (Vol. 92, Issue 3). Springer <https://doi.org/10.1007/s11573-022-01081-0> Berlin Heidelberg.

- Muflihani, F. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Kota (Studi Kasus Pada <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169173711> Kota Palu).
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. M. (2021). Analysis of regional financial capacity in the context of implementing regional autonomy in the province of East Nusa Tenggara. *Inovasi*, 17(1), 184–197.
- Nuraeni, Nunung, K. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Gorontalo Accounting Journal*, 7.
- Panawan, A. R., Kitta, S., & D, S. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *EJ: Ezenza Journal*, 2(April), 141–153. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB2.pdf>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, <https://doi.org/10.18196/jai.2002114> 20(2), 1–25.
- Rodríguez Bolívar, M. P., López Subires, M. D., Alcaide Muñoz, L., & Navarro Galera, A. (2021). The financial sustainability of local authorities in England and Spain: a comparative empirical study. *International Review of Administrative Sciences*, <https://doi.org/10.1177/0020852319834721> 87(1), 97–114.
- Sebastian, M. R., Oktarida, A., & Aprianti, S. (2023). Financial Sustainability In South Sumatra Province. *Proceeding of Accounting, Management, Business and Sustainability*, 1, 123–132.
- Siska, A. (2025). Determinan Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.
- Supriatna, J. (2021). Pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Surgawati, I. (2022). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 75–85. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i2.3566>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114.
- Wardhani, D. T., & Payamta, P. (2020). Menguji Faktor Determinan Financial Sustainability pada Sektor Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(1), 13. <https://doi.org/10.33603/jka.v4i1.3305>
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan ekonomi indonesia perspektif



ekonomi islam: peran inflasi, pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri dan pembiayaan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 223–238.

Wiksuana, I. G. B., & Kusumawati, L. (2017). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Kabupaten Wilayah. Analisis Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 7(5), 2592–2620. <https://media.neliti.com/media/publications/254231-pengaruh-pendapatan-daerah-terhadap-pert-4a386eeb.pdf>